
Daftar Isi

Tata Cara Mengemas Produk Pariwisata pada Daerah Tujuan Wisata

Edwin Fiatiano

165-174

Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia

Sulikah Asmorowati

175-190

***Community Based Tourism (CBT)* sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Sri Endah Nurhidayati

191-202

Hermeneutika: Pemahaman Konseptual dan Metodologis

Mochtar Lutfi

203-207

Status Wanita dalam Perspektif Kajian Studi Kependudukan

I.B. Wirawan

208-219

Praktik Diskursif *The Theory of Truth* Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa di Indonesia

Moch. Jalal

220-227

Petani Garam dalam Jeratan Kapitalisme: Analisis Kasus Petani Garam di Rembang, Jawa Tengah

Yety Rochwulaningsih

228-239

Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatera Barat

Afrizal

240-256

***Community Based Tourism (CBT)* sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Sri Endah Nurhidayati

Program Studi D3 Pariwisata FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

The continuation of tourism development is represented in the management of the entire resources in such a manner so that the requirement of economics, social and esthetics can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological process, biological diversity and life supporter systems. One approach to the continuation of tourism development is community Based Tourism (CBT). It is an approach emphasizing at local society (both for direct and indirect involvement in tourism industry) in the form of giving opportunity access in the management and development of the tourism, which culminates in the political enableness, through more democratic life including fair profit sharing of tourism activities for the local society.

Key words: *tourism, development, continuation, profit sharing, local society.*

Ide tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berakar dari pemikiran yang berusaha mengintegrasikan perspektif ekonomi dan persepektif ekologi seperti yang digagas Word Commission on Environment and Development (WCED). Pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai alternatif pembangunan yang mencoba menjembatani paradigma *developmentalis* atau *environmentalis*. Pembangunan berkelanjutan memerlukan proses integrasi ekonomi dan ekologi melalui upaya perumusan paradigma dan arah kebijakan yang bertumpu pada kemitraan dan partisipasi para pelaku pembangunan dalam mengelola sumber daya seoptimal mungkin (Baiquni, 2002:37). Lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan berawal dari

penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Lingkungan hidup manusia (United Nation Conference on Human Environment/UNCHE) di Stockholm Swedia tanggal 5-16 Juni 1972 yang dihadiri 113 negara termasuk Indonesia (Emil Salim). Konfrensi tersebut menandai keperdulian global terhadap lingkungan sekaligus langkah awal lahirnya paradigma yang melihat hubungan pembangunan dan ketersediaan SDA.

Pasca Konfrensi Stockholm, didorong kondisi global yang makin memperhatikan (kelaparan, kemiskinan dan pencemaran lingkungan) tahun 1983 dibentuk Word Commission on Environment and Development (WCED) dengan 22 anggota komisi, termasuk Emil Salim (Indonesia), yang bertugas

menyusun formulasi Agenda Global untuk Perubahan. Komisi memfokuskan kajian pada 8 area analisis yaitu perspektif tentang kependudukan, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; energi; industri; keamanan pangan, pertanian, kehutanan, lingkungan dan pembangunan; pemukiman manusia; hubungan ekonomi internasional; sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan lingkungan; dan kerjasama internasional.

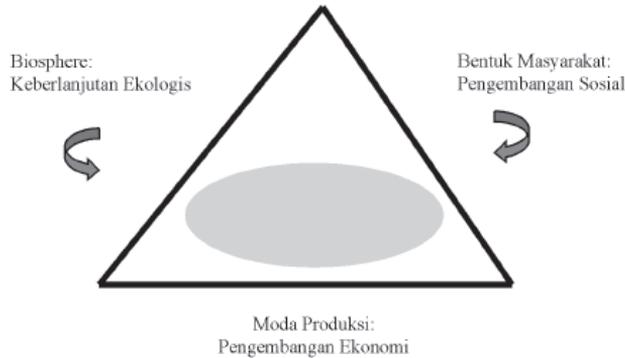
Setelah bekerja selama 4 tahun (1987) komisi memaparkan laporan yang berjudul Masa Depan Kita Bersama (*Our Common Future*) atau dikenal dengan Brundtland Report, di mana untuk pertama kali dirumuskan konsep Pembangunan Berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mencoba mempertemukan aspek pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan.

Tahun 1992 diselenggarakan Konferensi tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan atau KTT Bumi (*Earth Summit*) atau dikenal dengan istilah United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil. UNCED atau *Earth Summit* juga begitu penting karena untuk pertama kalinya memberikan kesadaran ke seluruh dunia bahwa masalah lingkungan sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi dan masalah keadilan sosial. Setelah *Earth Summit* 1992, berlangsung berbagai proses dan perkembangan yang penting dalam rangka menciptakan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh dunia.

Pengkajian secara menyeluruh dan komprehensif 10 tahun pelaksanaan Agenda 21 akan dilaksanakan tahun 2002 dalam bentuk Konferensi Tingkat Tinggi

Dunia (World Summit on Sustainable Development/WSSD) di Johannesburg, Afrika Selatan tanggal 2 - 12 September 2002 atau dikenal sebagai Rio+10. Lebih dari 189 kepala pemerintahan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut. Rio+10 merupakan pertemuan para kepala pemerintahan, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, badan-badan di bawah PBB, lembaga keuangan internasional dan aktor penting lain untuk menilai perubahan yang terjadi di seluruh dunia setelah *Earth Summit* atau *ratory Committee*) sebanyak empat kali yang disebut dengan PrepCom I - IV.

Agenda yang terfokus akan memperkuat diskusi mengenai berbagai temuan dalam sektor-sektor lingkungan secara khusus (hutan, laut, iklim, energi, air tawar, dll) dan juga topik lintas sektoral seperti kondisi ekonomi, teknologi baru dan globalisasi. Sesuai dengan Resolusi SMU-PBB ke-55 tahun 2000, tujuan utama WSSD adalah mengevaluasi pelaksanaan Agenda 21 (10 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan) dan menghidupkan kembali komitmen global mengenai pembangunan berkelanjutan dengan cara mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan serta mencari upaya untuk memfasilitasi keberhasilan dan mengatasi hambatan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengeluarkan Agenda 21 Indonesia nasional mengenai strategi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional serta memiliki Agenda 21 Sektoral yang dapat dijadikan dasar di dalam meningkatkan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia meratifikasi seluruh hasil konvensi UNCED 1992 (UNFCCC, UNCBD dan UNCCD) dan memiliki perangkat normatif penunjang pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan seperti



Gambar 1. Tiga Dimensi Pembangunan Berkelanjutan.
Sumber: Baiquni, 2002:34

Undang-Undang Lingkungan Hidup serta beberapa ketentuan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri.

Konsep Dasar

Pembangunan berkelanjutan menurut *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)* yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk pertama kalinya muncul konsep yang mencoba mempertemukan aspek pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan (ekologis). Konsep tersebut memiliki makna yang luas dan menjadi payung bagi banyak konsep, kebijakan, dan program pembangunan yang berkembang secara global. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru yang memiliki interpretasi konsep atau aksi yang beragam (Baiquni, 2002:34). Selanjutnya pembangunan berkelanjutan didefinisikan dalam *Caring for the Earth* sebagai upaya peningkatan mutu kehidupan manusia namun masih dalam kemampuan

daya dukung ekosistem (IUCN, UNEP dan WWF dalam Baiquni, 2002:34).

International Institute for Sustainable Development (IISD) bersama kalangan bisnis mengajukan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai adopsi strategi-strategi bisnis dan aktifitas yang mempertemukan kebutuhan-kebutuhan perusahaan dan stakeholder pada saat ini dengan cara melindungi, memberlanjutkan, serta meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan dibutuhkan pada masa mendatang (Satriago dalam Baiquni, 2002: 34). Sementara itu Burger (dalam Baiquni, 2002:34) secara diagramatis menggambarkan pembangunan berkelanjutan sebagai interaksi tiga komponen besar yaitu biosphere, masyarakat, dan moda produksi ekonomi.

Menurut Baiquni (2002:35) pembicaraan tentang pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan empat hal. Pertama, upaya memenuhi kebutuhan manusia yang ditopang dengan kemampuan dan daya dukung ekosistem. Kedua, upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan cara melindungi dan memberlanjutkan. Ketiga, upaya

meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Keempat, upaya mempertemukan kebutuhan manusia secara antar generasi. Menurut Sharpley (2000:2). Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan kolaborasi dari kata pembangunan (*development*) dan berkelanjutan (*sustainability*). Sustainability (keberkelanjutan) menurut Becker & Jahn (1999:69) memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu: pertama, penekanan pada aspek lingkungan; kedua, kondisi lingkungan saat ini, dan ketiga, respon masyarakat terhadap permasalahan lingkungan. Perpaduan indikator ini dikembangkan oleh New Economics Foundation dan WWF yang direfleksikan dan disampaikan dalam Agenda 21.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang mensejajarkan dua pandangan/aliran yaitu teori pembangunan (konteks pembangunan) dan keberlanjutan lingkungan (konteks lingkungan). Sharpley (2000:8) mengajukan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pada Tabel 1.

Berkaitan dengan syarat pembangunan berkelanjutan yang disampaikan Sharpley aspek yang jarang dibahas adalah keberlanjutan sosial (*social sustainability*). Goulet menyampaikan secara eksplisit sosial sustainability sebagai *related concern* dalam organisasi internal antara masyarakat manusia dan masyarakat dunia dimana saling ketergantungan makin meningkat. Untuk itu menurut Goulet etika pembangunan

Tabel 1. Prinsip-prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip dasar/pokok	Pendekatan holistik: pembangunan dan lingkungan merupakan masalah yang terintegrasi dengan politik global, sosial ekonomi global serta konteks ekologi global, oleh karena itu memerlukan perspektif yang holistik. Keakanan/futurity: difokuskan pada kesinambungan ekosistem global untuk jangka panjang. Keseimbangan: pembangunan yang memberikan kesempatan yang adil dan seimbang dalam akses dan penggunaan sumber daya pada semua anggota masyarakat, baik sekarang maupun yang akan datang.
Tujuan Pembangunan	Memperbaiki kualitas hidup semua orang: pendidikan, harapan hidup, kesempatan yang mungkin dipenuhi. Kebutuhan dasar yang diharapkan; terkonsentrasi pada alam yang menyediakan pendapatan yang lebih dari sekarang. Percaya diri: kebebasan politik dan pembuat kebijakan tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pembangunan yang beragam.
Tujuan yang berkesinambungan	Tingkat populasi yang berkelanjutan. Meminimalkan menipisnya persediaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui (penghematan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui). Penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Polusi yang dihasilkan memperhitungkan daya dukung lingkungan.
Syarat pembangunan berkelanjutan	Mengadopsi paradigma sosial baru yang sesuai dengan kehidupan berkelanjutan. Sistem politik dan ekonomi nasional dan internasional ditujukan untuk pembangunan dan penggunaan sumber daya yang wajar. Pengembangan secara terus menerus sistem teknologi yang dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah lingkungan. Memberi fasilitas kepada perkumpulan global yang terintegrasi dalam pembangunan kepada politik tingkat lokal, nasional dan internasional.

Sumber: Streeten (1977); Pearce et al. (1989); WCED (1987); IUCN(1991) dalam Sharpley , 2000:8).

sangat penting termasuk didalamnya adalah kearifan lingkungan. Menurutnya, tidak akan ada etika pembangunan sosial tanpa kearifan lingkungan dan sebaliknya tidak ada kearifan lingkungan tanpa etika pembangunan sosial (Becker & Jahn, 1999:27)

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Meski memperoleh perhatian khusus dari akademisi pariwisata dan praktisi pembangunan pariwisata beberapa tahun terakhir, namun literature tentang konsep dan teori pariwisata seringkali gagal menghubungkan pariwisata dengan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai kesatuan paradigma Sehingga penerapan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pariwisata masih banyak diragukan. Hal ini menimbulkan ketertarikan dunia akademis untuk mendiskusikan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sharpley, 2000:1). Definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa memiliki makna beragam. Orang dari banyak bidang yang berbeda menggunakan istilah berbeda di dalam konteks yang berbeda dan mereka mempunyai konsep, bias, dan pendekatan berbeda (Heinen dalam Sharpley, 2000:1). WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, keanakeragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Produk pariwisata berkelanjutan dioperasikan

secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat dan budaya, sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata (Anonim, 2000:xvi). Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu panjang (Sharpley, 2000:10).

Berkaitan dengan upaya menemukan keterkaitan anatara aktifitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan Cronin (Sharpley, 2000:1), menkonsepkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembanguan yang terfokus pada dua hal, keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi dan lainnya mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Stabler & Goodall (Sharpley, 2000:1), menyatakan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten/sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lane (dalam Sharpley, 2000:8) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah hubungan triangulasi yang seimbang antara daerah tujuan wisata (*host areas*) dengan habitat dan manusianya, pembuatan paket liburan (wisata), dan industri pariwisata, dimana tidak ada satupun stakeholder dapat merusak keseimbangan. Pendapat yang hampir sama disampaikan Muller yang mengusulkan istilah *magic pentagon* yang merupakan keseimbangan antara elemen pariwisata, dimana tidak ada satu faktor atau *stakeholder* yang mendominasi.

Prinsip dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Sharpley (2000:9-11) yang mengacu pada prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang holistik sangat penting. Untuk diterapkan secara umum, pada sistem

pariwisata itu sendiri dan khusus pada individu di daerah tujuan wisata atau sektor industri. Selama ini meskipun pariwisata diterima dan terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional dan lokal, namun fokus utama pembangunan pariwisata berkelanjutan masih ke arah produk center. Tidak heran jika pada tingkat operasional sulit mengatur penerimaan yg komplek, fragmentasi, pembagian multisektor dari keuntungan pariwisata secara alamiah. Oleh karenanya menurut Forsyth (dalam Sharpley, 2000:9) pariwisata berkelanjutan dalam prakteknya cenderung terfokus eksklusif setempat, proyek pembangunan relatif berskala kecil, jangkauannya jarang melebihi wilayah/lingkungan lokal atau regional, atau sebagai sektor industri yang spesifik/khusus. Pada saat yang bersamaan, sektor yang berbeda dari industri pariwisata mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat, mengadopsi kebijakan lingkungan dan meski kecil telah menunjukkan filosofi bisnis dan pembangunan yang mengarah pada prinsip-prinsip keberlanjutan antarindustri. Menurut Sharpley peningkatan kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat tergantung pada variasi faktor politik ekonomi yang dapat menghalangi diterapkannya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Aronsson (2000:40) mencoba menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang intepretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu 1) pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memilislppki perspektif ekologis, 2) pembangunan pariwisata berkelanjutan menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal/setempat, 3) pembangunan pariwisata

berkelanjutan menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksploitasi daerah setempat, 4) pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan peninggalan budaya di daerah tujuan wisata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau *Sustainable Tourism Development* menurut Yaman & Mohd (2004:584) ditandai dengan empat kondisi yaitu: 1) anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata, 2) pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan, 3) kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung, 4) investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternatif.

Sedangkan indikator yang dikembangkan pemerintah RI tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan (Anonim, 2000) adalah: 1) kesadaran tentang tanggungjawab terhadap lingkungan, bahwa strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata sebagai *green industry* (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi tanggungjawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan, 2) peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata, 3) kemantaban/keberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional, dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata, 4) kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan menghapus/meminimalisir

perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi perhatian/pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat lokal.

Community Based Tourism (CBT)

Menurut Garrod (2001:4), terdapat dua pendekatan berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. Pendekatan pertama yang cenderung dikaitkan dengan sistem perencanaan formal sangat menekankan pada keuntungan potensial dari ekowisata. Pendekatan ke dua, cenderung dikaitkan dengan istilah perencanaan yang partisipatif yang lebih *concern* dengan ketentuan dan pengaturan yang lebih seimbang antara pembangunan dan perencanaan terkendali. Pendekatan ini lebih menekankan pada kepekaan terhadap lingkungan alam dalam dampak pembangunan ekowisata.

Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah dengan menerapkan *Community Based Tourism (CBT)* sebagai pendekatan pembangunan. Definisi CBT yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Dengan demikian dalam pandangan Hausler CBT merupakan suatu

pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak) dalam bentuk memberikan kesempatan (akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Hauler menyampaikan gagasan tersebut sebagai wujud perhatian yang kritis pada pembangunan pariwisata yang seringkali mengabaikan hak masyarakat lokal di daerah tujuan wisata. Suansri (2003:14) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Atau dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam definisi yang disampaikan Suansri, gagasan untuk memunculkan *tools* berpadigma baru dalam pembangunan pariwisata adalah semata-mata untuk menjaga keberlangsungan pariwisata itu sendiri. Untuk itu ada beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan Suansri (2003:12) dalam gagasannya yaitu: 1) mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata, 2) mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek, 3) mengembangkan kebanggaan komunitas, 4) mengembangkan kualitas hidup komunitas, 5) menjamin keberlanjutan lingkungan, 6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, 7) membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, 8) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia,

9) mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas, 10) berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

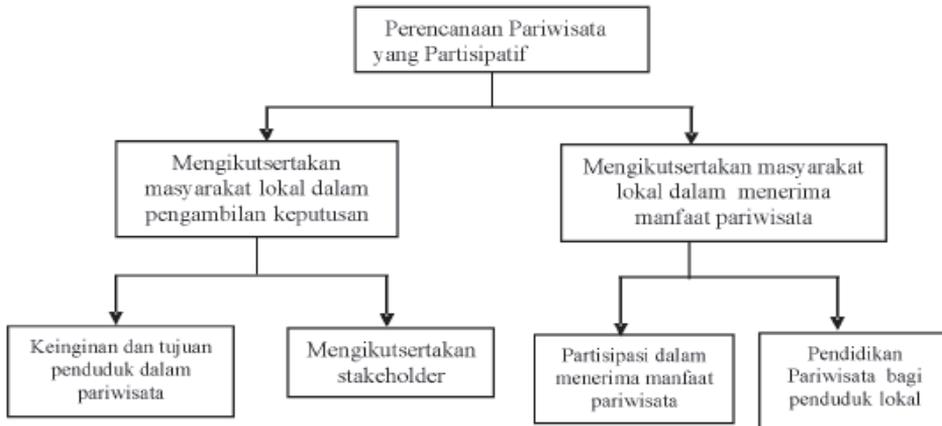
Sepuluh prinsip dasar tersebut harus menjadi tumpuan, arah dan prinsip dasar dari pembangunan pariwisata agar keberlanjutannya terjamin. Meski dalam prinsip dasar yang disampaikan secara eksplisit Suansri lebih memfokuskan pada kepentingan masyarakat lokal, tetapi ide utama yang disampaikan Suansri dalam prinsip dasar tersebut adalah hubungan yang lebih seimbang antara wisatawan dan masyarakat lokal dalam industri pariwisata. Keseimbangan yang dimaksud antara lain dalam hal status kepemilikan komunitas, pembagian keuntungan yang adil, hubungan sosial budaya yang didasari sikap saling menghargai, dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan. Sebagai tindak lanjut Suansri (2003:21-22) menyampaikan point-point yang merupakan aspek utama pengembangan CBT berupa 5 dimensi, yaitu: 1) dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata; 2) dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas; 3) dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam udaya lokal; 4) dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carryng capacity area*, mengatur pembuangan

sampah, meningkatkan keperdulian akan perlunya konservasi; 5) dimesi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

CBT berkaitan erat dengan adanya partisipasi dari masyarakat lokal. Menurut Timothy (1999:372) partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif yaitu dalam partisipasi lokal dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi lokal berkaitan dengan keuntungan yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Berkaitan dengan CBT, Timmoty menggagas Model normatif partisipasi dalam pembangunan pariwisata digambarkan dalam Gambar 1.

Pada Gambar 1 menunjukkan 3 hal pokok dalam perencanaan pariwisata yang partisipatif yaitu berkaitan dengan upaya mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya partisipasi masyarakat lokal untuk menerima manfaat dari kegioatan pariwisata dan pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal, yang dikenal dengan nama *Albeit Western Perspektif*. Ciri-ciri khusus dari *Community Based Tourism* menurut Hudson (Timothy, 1999:373) adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta lain kelompok memiliki ketertarikan/minat, yang memberi kontrol lebih besar dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan.

Sedangkan Murphy (1985:153) menekankan strategi yang terfokus pada identifikasi tujuan masyarakat tuan rumah dan keinginan serta kemampuan mereka menyerap manfaat pariwisata. Menurut Murphy setiap masyarakat harus didorong



Gambar 2. Model Normatif Partisipatif dalam Pembangunan Pariwisata.

Sumber: Timothy, 1999:372

untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan juga masyarakat setempat. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Yogyakarta Timothy (1998:377-382) menggunakan beberapa variabel sebagai berikut. Pertama, proses konsultasi publik dan definisi tujuan setempat (lokal), dalam hal ini menanyakan kepada pedagang kecil, pemilik penginapan, pemilik restoran/warung dan persewaan mobil yang ada di sekitar Malioboro apakah mereka diajak berkonsultasi oleh pemerintah tentang perencanaan pariwisata, apakah mereka merasa pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat lokal untuk merencanakan pariwisata dan apakah mereka ingin lebih dilibatkan dalam perencanaan pariwisata.

Kedua, input/masukan/pendapat dari *stakeholder* (masyarakat, pemerintah termasuk organisasi kepariwisataan seperti

PHRI, ASITA) dan NGO, yaitu berkaitan dengan perlu tidaknya mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata dan proses perencanaan kepariwisataan yang ada di Yogyakarta. Ketiga, mengikutsertakan masyarakat lokal dalam memanfaatkan industri pariwisata. Keempat, pendidikan bagi penduduk lokal.

Keuntungan dari pendekatan perencanaan yang partisipatif menurut Drake dan Paula (dalam Garrod, 2001:6) adalah: 1) mengkonsultasikan proyek dengan masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam manajemen penerapan proyek dan/atau pengopeasian proyek dapat meningkatkan efisiensi proyek, 2) efektifitas proyek jauh lebih meningkat dengan mengikutsertakan masyarakat yang dapat membantu memastikan jika tujuan proyek bisa ditemukan dan keuntungan akan diterima kelompok/masyarakat lokal, 3) sebagai *capacity building* bagi kelompok masyarakat agar mereka memahami apa itu ekowisata dan peranannya dalam pembangunan berkelanjutan. (terjamin bahwa yang terlibat sangat nampak keikutsertaannya secara aktif dalam proyek

dengan pelatihan formal/informal serta kegiatan untuk meningkatkan keperdulian), 4) pemberdayaan lokal meningkat dengan memberi masyarakat lokal kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya dan memutuskan penggunaan sumber daya yang berpengaruh/penting sesuai dengan tempat tinggal mereka. (artinya menjamin jika masyarakat lokal menerima keuntungan yang sesuai dengan penggunaan sumber daya), 5) pembagian keuntungan dengan warisan lokal (lokal beneficiaries), misal biaya tenaga kerja, biaya keuangan, operasional dan perawatan proyek dan/atau monitoring dan evaluasi proyek.

Lebih lanjut Garrod (2001) menyampaikan elemen-elemen dari perencanaan pariwisata partisipatif yang sukses yaitu: 1) membutuhkan kepemimpinan yang efektif (memiliki kredibilitas sebagai orang yang memahami, empati dan peduli dengan pendapat *stakeholder*, memiliki kredibilitas sebagai seseorang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di daerah tersebut, mandiri, memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah yang nyata dan tidak nyata, memiliki kemampuan mengatur partisipan, bersedia mengembangkan kelompok), mampu mengarahkan keterlibatan yang sifatnya *top down* ke *bottom up*), 2) pemberdayaan masyarakat lokal, 3) mengkaitkan keuntungan ekonomi dengan konservasi, 4) melibatkan *stakeholder* lokal dalam setiap tahapan proyek, 5) adanya partisipasi lokal dalam monitoring dan evaluasi proyek.

Sementara itu Yaman & Mohd (2004: 584-587) menggarisbawahi beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu: pertama, adanya dukungan pemerintah: CBT membutuhkan dukungan struktur yang multi institusional agar sukses

dan berkelanjutan. Pendekatan CBT berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga SDA dan budaya. Pemerintah akan berfungsi sebagai fasilitator, koordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.

Kedua, partisipasi dari *stakeholder*. CBT didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian /penghidupan masyarakat. CBT secara umum bertujuan untuk penganekaragaman industri Peningkatan skope partisipasi yang lebih luas ini termasuk partisipasi dalam sektor informal, hak dan hubungan langsung/tidak langsung dari sektor lainnya. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunan aktivitas ekonomi yang lain seperti industri, jasa dan sebagainya. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan *tour operator*, *travel agent* untuk memulai bisnis baru.

Ketiga, pembagian keuntungan yang adil. Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sector pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan ekowisata jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.

Keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Di mana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkat nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke desa.

Kelima, penguatan institusi lokal. Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya dan pengunjung. Hal ini jelas membutuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di sana. Yang paling baik adalah terbentuk lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan ketrampilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan, dan pengalaman organisasi. Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, dan manajemen komite.

Keenam, keterkaitan antara level regional dan nasional. Komunitas lokal seringkali kurang mendapat link langsung dengan pasar nasional atau internasional, hal ini menjadi penyebab utama mengapa manfaat ekowisata tidak sampai dinikmati di level masyarakat. Perantara yaitu yang menghubungkan antara aktifitas ekowisata

dengan masyarakat dan turis justru memetik keuntungan lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Adams, W. M., *Green Development Environment and Sustainability in the Third World* (London: Routledge, 1990).
- Anonim, *Agenda 21 Sektor Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan* (Jakarta: Proyek Agenda 21 Sektor Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 2000).
- Aronsson, Lars, *The Development of Sustainable Tourism* (London: Continuum, 2000)
- Baiquni, M, "Integrasi Ekonomi dan Ekologi dari Mimpi Menjadi Aksi," *Wacana*, III, 12, 2002.
- Becker, Egon, & T. Jahn (eds.), *Sustainability and The Social Sciences* (New York: UNESCO dan ESOI, 1999).
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001).
- Garrod, Brian, *Local Partisipation in the Planning and Management of Ecotourism: A Revised Model Approach* (Bristol: University of the West of England, 2001).
- Mowforth, Martin, & I. Munt, *Tourism and Sustainability New Tourism in the World* (London: Routledge, 1998).
- Murphy, P.E., *Tourism: A Community Approach* (London: Methuen, 1985).
- Richard Sharpley, "Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Dvice," *Journal Of Sustainable Tourism* VIII (1): 1-19, 2000.

Suansri, Potjana, *Community Based Tourism Handbook* (Thailand: REST Project, 2003).

Suhanadji & T.S. Waspodo, *Modernisasai dan Globalisasi* (Surabaya: Insan Cendekia, 2004).

Timothy, D.J., "Participatory Planning a View of Tourism in Indonesia,"

Annals Review of Tourism Research, XXVI (2) 1999.

Yaman, Amat Ramsa & A. Mohd, "Community-based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia," dalam *Journal of Applied Sciences IV* (4):583-589, 2004.